

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, 2007, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence*, Kencana, Makassar.
- Ali, Zainuddin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eddy OS. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Faudy ,Munir dan Laura ,Sylfia, 2015 *Hak Tersangka Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika , Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- H.M. Syarifuddin, 2021, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Yogyakarta.
- Hieariej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Leaderer, Fredric, 1999, *The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today's- and Tomorrow's- High Technology Courthrooms*, Virginia, Faculty Publications, William and Mary Law School Scholarship Repository.

- Lawrance Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Hadjon, Philipus, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahkamah Agung, 2010, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Prodjohamidjojo, 1982, *Tanya Jawab KUHAP*, Chalia Indonesia, Jakarta.
- Oskamp, et. al, 2004, *IT Support of the Judiciary: Australia, Singapore, Venezuela, Norway. Th Netherlands*, The Hague Press, Cetakan Ke-1, Belanda.
- Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sibuea, Hotman P, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, Erlangga, Jakarta.
- Setiono, 2010, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sumardjono, Maria SW, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Jakarta.

Suseno, Sigid dan Masyhudi, 2021, *Sidang Virtual: Idealisme, Peluang, Tantangan dan Implementasinya*, Kompas, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta, Edisi Ke-7 Liberty, Yogyakarta.

Syarifuddin, Muhammad, 2020, *Transformasi Digital Persidangan Di Era NewNormal: Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19*, Imaji Cipta Karya, Jakarta.

Soesilo, R. 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Politeria, Bogor.

Sutarto, Suryono, 1987, *Sari Hukum Acara Pidana 1*, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang.

Jurnal

Dewi Rahmaningsih Nugroho & S.Suteki, *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2 No. 3 Tahun 2020.

Romualdus Jefan Saradodo, *Urgensi Pengawasan Terhadap Hakim dalam Rangka Pelaksanaan E-Court dan E-Litigation di Indonesia*, Jurnal Hukum POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juni 2022

Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Crepido, Vol. 02, No.01, Juli 2020.

Bhakti Teguh Satya, *Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung RI (RUU MA): Pengkajian Filosofi, Sejarah, Asas, Norma dalam Dinamika Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2, 2017

Desak Paramita Brata *Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana*, e-Journal Komunias Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 3, No. 1 Tahun 2020,

Firmansyah, *Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif*, Elastisitas (Jurnal Ekonomi Pembangunan), Program Magister Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram, 2021

Panji Purnama, *Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal *Rechtvinding*, Vol. 10, No. 1, 2021

Ruth Marina Damayanti Siregar, 2015, *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Jurisprudence, Vol 5, No 1, Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Sonyendah Retnaningsih, et.al, *Pelaksanaan E-Court Menurut PERMA Nomor 3 Tahun , 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.50, No.1, 2020.

Karya Ilmiah

Tesis

Panji Purnama, 2021, "*Penerapan E-court Sebagai Salah Satu Cara Mewujudkan Integrated Judiciary pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*", Tesis, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

Dhafi Adliansyah Arsyad, 2022, "*Penuntutan Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik*", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Sucihana Andinisari Purnamasari, 2022, *Kepastian Hukum Pembuktian Surat Dalam Persidangan Secara Elektronik*, Tesis, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Pidato

Eddy O.S. Hiariej, *Penyampaian materi mata kuliah Hukum Pembuktian*, Pidato, Program Studi Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, November 2021.

Rini Nurhayati, S.B Waluya dan T.S Noor Asih, *Model Pembelajaran Inkuiri Blended Learning Strategi Flipped Classroom dengan Media Interaktif untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis*, Seminar Nasional Pascasarjana, Prodi Pendidikan Matematika, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Tahun 2019.

Internet

Admin, Responden adalah: Pengertian, Syarat, dan Contoh, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/responden-adalah/>.

Admin, 2023, Pengertian Sarana Dan Prasarana Menurut Para Ahli di Indonesia, dikutip dari : <https://ilmupendidikan.net/pengertian-sarana-dan-prasarana-menurut-para-ahli/>.

Aida Mardatillah, *Begini Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online*, - www.hukumonline.com.

Ayu Rifka Sitoresmi, Narasumber adalah Orang yang Memberi Informasi, Pahami Tugas dan Syaratnya, <https://www.liputan6.com/hot/read/4552929/narasumber-adalah-orang-yang-memberi-informasi-pahami-tugas-dan-syaratnya>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sarana>

Kabar Pemalang, *BST Cair, Warga Padati Kantor Pos*, <https://kabarpemalang.id/arsip/bst-cari-warga-padati-kantor-pos/>.

Nafiatul Munawaroh, Kekuatan Hukum Produk Hukum MA, PERMA, SEMA, Fatwa, dan SK KMA, dalam: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/>.

Pemalangkita.id, *Cek! Info pemadaman listrik di Pemalang, Jumat (27/1/2023)*, <https://jateng.solopos.com/cek-info-pemadaman-listrik-di-pemalang>.

Pemerintah Kabupaten Pemalang, *Profil Kabupaten Pemalang*, <https://pemalangkab.go.id/profil/kabupaten-pemalang>.

Pemerintah Kabupaten Pemalang, *Statistik Pekerjaan Penduduk Kabupaten Pemalang*, <https://sidekem.pemalangkab.go.id/datapublik/kabupaten/pekerjaan/>.

Pengadilan Negeri Pemalang, *Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)*, http://sipp.pn-pemalang.go.id/list_perkara/page/.

Mirza Fahlevy, *Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, diakses melalui : <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/>.

Riki Perdana Raya Waruwu, “*Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung*”, diakses melalui <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/kegiatan/9-kegiatan/139-penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-PERMA>.

Riki Perdana Raya Waruwu, “*Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung*”, diakses melalui <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/kegiatan/9-kegiatan/139-penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-PERMA>.

Rizal Fadli, 2023, *Begitu Kronologi Virus Corona Masuk ke Indonesia*, www.halodoc.com/artikel/begitu-kronologi-virus-corona-masuk-Indonesia Diakses pada 2 oktober 2023.

Urgent.id, *Hasil tes kecepatan jaringan internet dan cek sinyal terkuat upload tercepat di daerah kabupaten pemalang*.
<https://urgent.id/kecepatan-internet/semua/Kabupaten%20Pemalang/semua/upload-tercepat?page=4>.

Widodo, Joko, *Pernyataan Pers Presiden RI terkait PPKM, Pidato, Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, 30 Desember 2022*, <https://setkab.go.id/ Pernyataan-pers-presiden-ri-terkait-ppkm-diistana-negara-provinsi-dki-jakarta-30-desember-2022/>, diakses pada hari Senin, 5 Mei 2023, pukul 15.27 WIB.

Yayang Nanda Budiman, *Trial By The Pres, Dunia Jurnalistik dan Asas Praduga Tak Besalah*, <https://thecolumnist.id/artikel/trial-by-the-pres-dunia-jurnalistik-dan-asas-praduga-tak-besalah-2169>.

Peraturan Prundang-undangan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 57/KMA/SK/1V/2016 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang pedoman penyusunan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang perubahan atas undang-undang

Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1128).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1128).

Lainnya

Ari Wibowo, Wawancara, Narasumber bersama Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, tanggal 13 Juli 2023.

Eka Sekti, Guntoro, Wawancara, Penelitian Lapangan bersama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang, tanggal 23 Maret 2023.

Irwan Adi Cahyadi, 2014, Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung

Dalam Hukum Positif di Indonesia, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, Malang

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online/daring (dalam jaringan)
<https://kbbi.web.id/sidang>.

MoU Mahkamah Agung RI Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Kejaksaan
Nomor: KEP-17/E--/Ejp/04/2020, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Persidangan Melalui *Teleconference* dan SK KMA RI
Nomor:108/KMA/SK/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan
Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (POKJA).

Nota Kesepahaman Nomor: 1/NK/MA/1/2016, Nomor:
NK/01/MENKO/OLHUKAM/01/20--16, Nomor: B/6/1/2016, Nomor:
KEP-022/A/JA/01/2016, Nomor: M.HH- 03.HM.05.02 Tahun 2016,
Nomor: 96/M.KOMINFO/HK.03.02/01/2016, Nomor:
NKB01/M.PPN/01/2016, Nomor: PERJ.8/SU/KH.02.01/01/2016.